

**PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TERHADAP KELOMPOK TANI DI KELURAHAN KEMPAS JAYA KECAMATAN
KEMPAS TAHUN 2019**

Oleh: Rosa Kartika Ayu

Email: rosakartika12@gmail.com

Pembimbing: Wazni, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Empowerment of farmer groups aims to develop a mindset and work of farmers whose processes are continuously carried out by the government. The government as an agent of empowerment must know and be able to adopt new innovations in order to create farmer welfare. The background of this thesis is the researcher's view of the phenomena that occur in the assessment of the ability of farmer groups in the Kempas Jaya Village. There are four farmer groups in the 2019 assessment process down to the advanced class which was previously the main class. With the formulation of the problem in this study are how and what factors are hindering the empowerment of the local government of Indragiri Hilir Regency against farmer groups in the Kempas Jaya Village, Kempas District in 2019. This research aims to describe the empowerment of local governments towards farmer groups and identify factors that hinder government empowerment. Indragiri Hilir Regency to farmer groups in the Kempas Jaya Village, Kempas District in 2019.

The research approach used is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The research location is in the Kempas Jaya Village, Kempas District, Indragiri Hilir Regency. With the type and source of research data is divided into primary data in the form of purposive informant retrieval techniques and secondary data in the form of supporting data related to farmer groups. Data collection techniques used interviews and documentation, while data analysis was carried out using qualitative analysis.

The results of this study indicate that the Local Government of Indragiri Hilir Regency has been able to empower farmer groups through several empowerment programs in four forms, namely human development, business development, environmental development and institutional development. However, in implementing the empowerment efforts of the Indragiri Hilir District Government to the farmer groups of the Kempas Jaya Village, they experience internal constraints from the lack of means of production, lack of institutional strengthening, and low knowledge of farmers, and constraints from external geographical conditions and extension workers.

Keywords: Empowerment, Farmer Groups, Local Government

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris artinya Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik dari sumber mata pencarian maupun sebagai penopang pembangunan. Pembangunan pertanian merupakan suatu hal yang sangat penting dari keseluruhan pembangunan nasional hal ini disebabkan potensi sumber daya alam yang besar dan banyaknya masyarakat menggantungkan hidup pada sektor ini. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga pihak swasta dan seluruh masyarakat sehingga diperlukan partisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Supaya partisipasi masyarakat tinggi, maka perlu diberdayakan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Bila pemberdayaan masyarakat berhasil, maka akan berkorelasi dengan keberhasilan pembangunan di daerah tersebut.

Upaya pemberdayaan petani melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Petani memberikan landasan yang cukup kuat bagi pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah daerah, yang didalamnya telah dijelaskan pada pasal 41 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan petani dilakukan

untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/permentan/sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada pasal 2 menyebutkan “Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dilakukan pembinaan dengan melibatkan kelembagaan penyuluhan dan penyuluh”.

Upaya pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/permentan/sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan. Berdasarkan peraturan ini diwajibkan penyuluh pertanian untuk penilaian kelas kemampuan kelompok tani dilakukan setiap tahun oleh penyuluh pertanian dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan kelompok tani.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 20 kecamatan dengan jumlah kelompok tani sebanyak 1.749 anggota kelompok tani yang terbagi menjadi 1.313 untuk kelompok tani pemula, 331 kelompok tani kelas lanjut, 70 untuk madya, dan 0 kelas utama kelompok tani. Namun tidak adanya jumlah kelas utama kelompok tani tahun 2019 disebabkan turunnya kelas kemampuan kelompok tani menjadi kelas lanjut. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1 1 Jumlah dan Kategori Kelas Kelompok Tani di Kelurahan Kempas Jaya Tahun 2019

No	Nama Kelompok Tani	Kategori Kelas		Nama Ketua
		2018	2019	
1	Setia Karya	Utama	Lanjut	Suhari
2	Pasundan	Utama	Lanjut	Jaya
3	Ingin Makmur	Utama	Lanjut	Paidi
4	Makmur	Utama	Lanjut	Tedi

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 99 kelompok tani di kelurahan Kempas Jaya terdapat 4 kelompok tani kategori kelas utama pada tahun 2018 namun terjadi penurunan pada tahun 2019. Sedangkan pada kelas madya terjadi kenaikan menjadi 36 kelas kelompok tani. Terjadinya proses kenaikan

kelas ini dikarenakan adanya aturan untuk melaksanakan proses penilaian.

Keberadaan kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya atas dasar kesamaan tujuan para pemilik usaha tani dan atas dasar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang

berakibat setiap penerima manfaat (bantuan) harus lembaga (kelompok) yang sudah berbadan hukum atau sudah terdaftar sebagai sebuah lembaga pada kementerian hukum dan hak asasi manusia mengacu pada pasal 298 ayat (5).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/sm.050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani terdapat pada lampiran I Bab II poin c nomor 4 menyatakan bahwa “penilaian kelas kemampuan kelompok tani dilakukan setiap tahun oleh penyuluh pertanian dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan kelompok tani”.

Akan tetapi pada di Kabupaten Indragiri Hilir penilaian kelas kemampuan kelompok tani tidak dilaksanakan setiap tahunnya sehingga untuk pembaharuan data dari setiap tahun tetap sama jumlah kelompok tani hal ini menyebabkan tidak ketahu apakah jumlah yang terdaftar pada sistem informasi manajemen penyuluh pertanian (Simluhtan) masih aktif atau tidak dan juga kemampuan kelompok tani setiap tahunnya tidak diketahui mengalami penurunan atau kenaikan, namun setiap laporan pertahunnya (2016-2018) tetap disusun dengan menggunakan data yang sama.

Setelah dilakukan penilaian pada kelompok tani makmur, kelompok tani ingin makmur, kelompok tani setia karya dan kelompok tani pasundan terjadi ketidakselarasan antara indikator kelas utama dengan kelompok tani dilapangan seperti yang terjadi pada kelompok tani makmur dan setia karya dikatakan utama dari data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali kekurangan yang dimiliki mereka dari mulai tidak adanya dasar aturan yang mengikat, administrasi pembukuan yang tidak berjalan, pengurus yang tidak aktif dalam menjalankan tugas mereka, dan pertemuan-pertemuan yang tidak rutin dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penyuluh Sumber Daya Manusia nomor 168/per/sm.170/j/11/11 tentang Petunjuk Penilaian Kemampuan Kelompok Tani menjelaskan bahwa klasifikasi yang dilakukan berdasarkan

kemampuan kelompok tani dikukuhkan dengan pemberian sertifikat. Akan tetapi yang terjadi pada kelompok tani Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tidak terdapat bukti sertifikat pengukuhan dari kategori setiap kelas kelompok tani yang dijelaskan pada peraturan diatas.

Berangkat dari latar belakang dan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Kelompok Tani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Tahun 2019.”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penentu keberhasilan manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pemberdayaan kelompok tani oleh pemberdayaan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas
- b. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat pemberdayaan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas 2019.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis Sebagai memberikan sumbangsih pada perkembangan Ilmu Pemerintahan dan kajian pemberdayaan masyarakat secara umum.
- b. Secara Praktis, dapat menjadi pedoman dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, praktisi, kalangan akademisi dan pihak yang berkepentingan lainnya serta membantu memecahkan

permasalahan dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

KERANGKA TEORI

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mas'ood (1990) pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.¹ Sedangkan menurut Craig dan Mayo (1995:50) konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan pemerataan.²

Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan lebih berperan sebagai fasilitator.³ Menurut Mardikanto, bahwa untuk memberdayakan masyarakat perlu dilakukan empat bina, yaitu⁴:

1. Bina Manusia

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan yang bermuara pada perbaikan mutu hidup dan kemandirian untuk tercapainya kesejahteraan oleh karena itu peningkatan kemampuan masyarakat baik individu maupun kelompok harus diperhatikan. Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan.⁵

2. Bina Usaha

Bina usaha diwujudkan dengan pengembangan kapasitas usaha, bina usaha menjadi suatu upaya yang sangat penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa bina usaha tidak memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan

kesejahteraan justru menimbulkan kekecewaan. Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti pemilihan komoditas dan jenis usaha, studi kelayakan dan perencanaan bisnis, pembentukan badan usaha, perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, pengelolaan SDM dan pengembangan karir, manajemen produksi dan operasi, manajemen logistik dan finansial, penelitian dan pengembangan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis, pengembangan jejaring dan kemitraan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung.⁶

3. Bina Lingkungan

Lingkungan dan pemberdayaan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemberdayaan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk kesejahteraan hidup orang banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sebaliknya, lingkungan membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi.⁸

4. Bina Kelembagaan

Pembinaan terhadap lembaga masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat.⁹ Hayami dan Kikuchi (1981) mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Pada prinsipnya suatu bentuk relasi-sosial dapat disebut sebagai sebuah

¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.26

² Alfitri, *Community development teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.22

³ *Ibid.*, hlm.60

⁴ *Ibid.*, hlm. 114

⁵ Muh. Zulkarnain, skripsi "Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan tamaona kabupaten gowu" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 83

⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko. *Op.cit.*, hlm.115

⁷ Muh. Zulkarnain. *Op.cit.*, hlm. 104

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, hlm.109

kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya ¹⁰:

1. Komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. Komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
3. Komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4. Komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankan secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Setiap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan seharusnya mampu memberikan manfaat, bagi kelompok maupun masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam setiap kegiatan, tentunya memiliki faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Menurut jurnal penelitian peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di desa kayuangen di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yang ditulis oleh Darmansyah, Muhammad Yusuf Badjido, dan Ahsan Samad, menjelaskan bahwa faktor yang menghambat dalam kegiatan pemberdayaan yaitu sebagai berikut ¹¹:

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Sarana Produksi

Sarana produksi merupakan salah satu faktor memperlancar dalam suatu

pembangunan pertanian. Hal ini karena dengan tersedianya sarana produksi sangat menentukan dalam budidaya tanaman. yaitu sarana yang ada hubungannya langsung dengan pertumbuhan tanaman di lapangan adalah benih, pupuk, bahan kimia pengendali musuh tanaman/perangsang tumbuh tanaman dan alat-alat pertanian. Ada bantuan sarana produksi untuk usaha tani merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi petani dalam meningkatkan produksi tanaman.

b. Kurangnya Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan kapasitas lembaga, maupun individu dalam memperbaiki sebuah kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan keorganisasian melalui penyempurnaan metode dalam organisasi.

c. Rendahnya Pengetahuan Petani

Pengetahuan merupakan salah satu komponen perilaku petani yang turut menjadi faktor dalam mengadopsi inovasi-inovasi baru, baik pengetahuan secara formal maupun non formal. Pendidikan formal adalah yang pernah ditamatkan oleh petani mendapatkan surat atau ijazah kelulusan sedangkan pendidikan non formal di dapat dari petani mengikuti pelatihan-pelatihan.

2. Faktor External

a. Kondisi Geografis

Kondisi geografis merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu dapat dilihat melalui aspek cuaca dan iklim, jenis tanah, dan sumberdaya air.

b. Tenaga Penyuluh

Tenaga penyuluh merupakan ujung tombak dari aparatur Negara yang sesungguhnya dalam program kedaualatan pangan. Hal ini dikarenakan penyuluh bertugas untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada petani agar pola pikir dan cara kerja para petani bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi pertanian.

¹⁰Totok Mardikanto dan Poerwoko. *Op.cit.* hlm. 116

¹¹ Darmansyah dkk, "Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di desa kayuangen kecamatan malunda kabupaten majene", *Ilmu Pemerintahan*. Vol.IV No.1, hlm. 51

Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena terkait pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompetensi, dan terlibat dengan topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Prasarana Dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, H.Syamsudin, SP;
2. Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, Rosmawati, SP;
3. Koordinator Penyuluh Kecamatan Kempas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan, H. Ali Amra, S.PKP;
4. Koordinator Penyuluh Pertanian Kelurahan Kempas Jaya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan, Suristo, AMD;
5. Lurah Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas, Rokimin S.P, M.Si;
6. Ketua Kelompok Tani Suhari; Tedi Susilo; Jaya dan Budi Wiyono.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian yakni Kabupaten Indragiri Hilir. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang telah

ditulis dari tahun 2016-2019 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data model *interaktif* yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan dengan proses adanya penyempurnaan data. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Kelompok Tani oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas terkhusus disini oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pemberdayaan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Tahun 2019.

Dalam pemberdayaan kelompok tani Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan melakukan fungsi pemberdayaan terhadap kelompok tani yang dapat dilihat melalui indikator berikut ini :

a. Bina Manusia

Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan.¹² Upaya pemberdayaan yang

¹²¹² Muh. Zulkarnain. Op.Cit., Hlm. 83

dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bina manusia dengan cara sosialisasi dan pelatihan yaitu sebagai berikut ini :

1. Sosialisasi dan Pelatihan

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui bina manusia dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan tentang program pemberdayaan untuk menambah pengetahuan petani dalam bertani yang modern dan meningkatkan hasil produksi pertanian di Kelurahan Kempas Jaya. Dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan ditengah-tengah masyarakat diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan terutama untuk pengelolaan agar nilai usaha petani semakin meningkat seperti pola tanam, pengolahan lahan, pencegahan penyakit, dan pengendalian hama.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kepada kelompok tani terkhusus kelompok tani kategori kelas utama Kelurahan Kempas Jaya bermacam-macam seperti jajar legowo (pola tanam), cara pemupukan dan penanganan hama. Sosialisasi yang ditujukan kepada kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani agar bertitik pada peningkatan pendapatan petani secara umum. Berikut ini dapat dilihat nama-nama kelompok tani kategori kelas utama.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus berusaha untuk memberikan motivasi agar petani di Kelurahan Kempas Jaya ikut berpartisipasi dalam segala bidang pemberdayaan yang dilakukan. Berikut adalah daftar pertemuan-pertemuan dan sosialisasi serta penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok tani yaitu :

1	Pemantapan Sistem Penyuluh Pertanian	15 November 2018	Pasundan dan Makmur
2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	12 September 2018	Setia Karya
3	Pertemuan UPJA Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	24 Juni 2019	Ingin Makmur dan Setia Karya
4	Pemberdayaan Petani Pemakai Air Dan Pengurus Utama Gender Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunana Tepat Guna	9 September 2019	Makmur dan Pasundan

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari pertemuan dan sosialisas yang dilaksanakan di Balai Penyuluh Pertanian Kempas tidak semua hadir ketika dilaksanakannya pelatihan dan sosialisasi tersebut. Seperti pada kegiatan pertemuan UPJA peningkatan Kempuan Lembaga Petani dengan jumlah peserta yang harus hadir 45 orang namun yang datang hanya 30 orang. dari hal ini dapat disimpulkan bahwa para petani di Kelurahan Kempas Jaya sebagian masyarakat memiliki pemikiran sudah mulai terbuka dan sebagian partisipasinya kurang.

b. Bina Usaha

Bina usaha adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat untuk menunjang sarana dan prasanana dalam menunjang peningkatan usaha masyarakat. Di Kelurahan Kempas Jaya pengembangan kapistas usaha berfokus pada usaha kecil dibidang pertanian yang diwujudkan dengan berbagai macam bantuan dari pemerintah dari segi modal, bibit, herbisida dan pupuk. Pemberdayaan kelompok tani melalui bina usaha diwujudkan dengan beberapa kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri hilir yaitu sebagai berikut :

1. Kredit Usaha Rakyat

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan memberikan

Tabel 1 1 Daftar Pertemuan dan Sosialisasi Kelompok Tani di Kelurahan Kempas Jaya

No	Agenda Kegiatan	Tanggal	Nama Kelompok Tani Yang Hadir
----	-----------------	---------	-------------------------------

fasilitas kepada kelompok tani di setiap desa/kelurahan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir berupa modal dengan cara menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berlaku mulai tahun 2018 dengan bekerjasama pihak bank, akan tetapi fasilitas asuransi pinjaman modal yang sudah difasilitasi ini tergantung setiap kelompok tani disetiap desa/kelurahan menggunakannya atau hanya menggunakan modal swadaya.

Pemerintah Daerah telah menyediakan bantuan dana kepada kelompok tani di setiap desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir namun di Kelurahan Kempas Jaya para petani menggunakan dana swadaya mulai dari proses tanam sampai dengan panen. Dengan sistem tanam jejar legowo kelompok tani mengalami panen hingga 5 kali dalam 2 tahun menyebabkan petani memiliki keuntungan dari proses tanam.

2. Pemilihan Komoditas Jenis Usaha

Masyarakat Kelurahan Kempas Jaya melihat peluang usaha dengan mempertimbangkan bahwa dengan jumlah produksi pertanian yang tinggi di Kecamatan Kempas yaitu Kelurahan Kempas Jaya. Beberapa masyarakat memanfaatkan peluang tersebut untuk membuat usaha yaitu usaha penggiling padi sering dikenal dengan sebutan *Rice Milling Unit* (RMU).

Hasil produksi yang dihasilkan petani Kelurahan Kempas Jaya dipasarkan melalui kilang padi atau dikenal dengan *Rice Milling Unit* (RMU). *Rice Milling Unit* (RMU) merupakan jenis penggiling padi baru yang mudah dioperasikan karena proses pengelolaan gabah menjadi beras dapat dilakukan dengan sekali proses.

3. Koperasi

Lembaga koperasi yang hadir di Kelurahan Kempas Jaya merupakan lembaga koperasi serba usaha dibentuk berdasarkan adanya kepentingan bersama untuk mempermudah dari proses penggilingan hingga pemasaran hasil panen yaitu berupa *Rice Milling Unit* (RMU).

4. Jangkauan Pemasaran

Jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kempas bisa menghasilkan penjualan diluar daerah

kelurahan hingga luar kabupaten, seperti Rengat (Kabupaten Indagiri Hulu), Bangkinang (Kabupaten Kampar) dan Padang (Sumantra Barat). Jangkauan pemasaran hasil produksi pertanian yang mulai meluas mengartikan pemasaran yang terjadi di Kelurahan Kempas Jaya sudah mulai membaik dari yang sebelumnya.

c. Bina Lingkungan

Lingkungan dan pemberdayaan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³ Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan.

1. Lingkungan Alam

Lingkungan fisik yang baik adalah lingkungan yang sehat untuk kehidupan manusia, artinya limbah yang dihasilkan oleh hasil pertanian ditangani dengan baik, sehingga tidak mencemari tanah, air dan udara.

Bahkan limbah tersebut kalau memungkinkan dapat didaur ulang menjadi barang yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Misalnya jerami sebagai limbah padi dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak.¹⁴ Lingkungan fisik Kelurahan Kempas Jaya lumayan cukup sehat untuk kehidupan manusia, hal ini di karenakan petani sebagaian sudah menangani dengan baik sehingga mengurai mencemaran tanah,air dan udara. Seperti dalam pengelolaan limbah padi sudah di daur ulang oleh *Rice Milling Unit* (RMU) Kelurahan Kempas Jaya menjadi sebuah olahan untuk pakan ternak. Sedangkan sebagaian kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya melakukan membersihkan dari

¹³ *Ibid.*, hlm.104

¹⁴ Dedeh Maryani dan Ruth Roselein E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublis, 2019), hlm. 212

lahan dengan cara membakar jerami hal ini dilakukan karena cepat dan mudah.

2. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial tersebut berupa kebudayaan yang diajarkan oleh seorang individu yang berinteraksi dengan individu lainnya. Dalam pembinaan lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menerapkan sistem gotong royong guna membina lingkungan masyarakatnya dengan semangat gotong royong.

Lingkungan sosial yang terjadi pada Kelurahan Kempas Jaya para petani menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik yaitu saling menguntungkan dan saling membantu ketika akan proses tanam, ketika proses tanam sudah mulai maka petani-petani yang tergabung di dalam kelompok tani melakukan gotong royong penanam padi yaitu sistem dengan perhari untuk sawah si A dan besok si B begitu seterusnya sampai semua tertanam dengan rapi.

d. Bina Kelembagaan

Pembinaan terhadap lembaga masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat.¹⁵

1. Komponen Person

Komponen person merupakan orang-orang yang terlibat didalam suatu kumpulan kelompok memiliki identitas yang jelas. Relasi sosial yang terjadi bisa disebut sebagai sebuah kelembagaan jika memiliki beberapa komponen seperti komponen person yang orang-orang terlibat jelas identitasnya, seperti di Kelurahan Kempas Jaya yang terlibat pada kelompok tani jelas identitasnya yaitu sebagai berikut ini :

Tabel 1 3 Identitas Kelompok Tani di Kelurahan Kempas Jaya

No	Nama Poktan	Kelas Poktan	Nama Ketua	ahun Berdi
1	Setia Karya	Lanjut	Suhari	1973

¹⁵ Muh. Zulkarnain. Op. Cit., hlm.109

2	Pasundan	Lanjut	Jaya	1974
3	Ingin Makmur	Lanjut	Paidi	1979
4	Makmur	Lanjut	Tedi Susilo	1973

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya memiliki 4 kelompok tani kelas lanjut yang sebelumnya masuk kategori kelas utama.

2. Komponen Kepentingan

Komponen kedua pada bina kelembagaan yaitu komponen kepentingan yang pada dasarnya sebuah lembaga memiliki tujuan dan bergabungnya petani-petani pada kelompok tani di sebuah desa/kelurahan tentu memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan sehingga mengharuskan untuk saling berinteraksi.

3. Komponen Aturan

Komponen ketiga yang menggambarkan bahwa lembaga tersebut adalah sebuah kelembagaan adanya aturan yang berlaku dan dibuat sesuai dengan indikator penilaian kelompok tani jika kelompok tani tersebut terdapat aturan yang mengikat maka bertambah nilai dari kelompok tani tersebut menjadi kelas selanjutnya. Seperti adanya aturan sistem gotong royog, proses peminjaman Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sedangkan untuk aturan dan norma secara tertulis setiap kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya tidak memiliki.

4. Komponen Struktur

Komponen struktur dalam pemberdayaan petani dilihat dari setiap anggota memiliki peran dan posisi mereka masing-masing. Seperti pada tingkat kabupaten Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kempas memiliki peran sebagai agen pemberdayaan yang masing-masing dari mereka memiliki peran sebagai penyuluh dan harus dilaksanakan demi tercapainya petani yang berdaya

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Kelompok Tani di Kelurahan Kempas

Menurut jurnal penelitian peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangan di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yang ditulis oleh Darmansyah, Muhammad Yusuf Badjido, dan Ahsan Samad, menjelaskan bahwa faktor yang menghambat dalam kegiatan pemberdayaan yaitu sebagai berikut¹⁶:

a. Faktor Internal

1. Kurangnya Sarana Produksi

Sarana produksi merupakan salah satu faktor memperlancar dalam suatu pembangunan pertanian. Hal ini karena dengan tersedianya sarana produksi sangat menentukan dalam budidaya tanaman, yaitu sarana yang ada hubungannya langsung dengan pertumbuhan tanaman di lapangan adalah benih, pupuk, bahan kimia pengendali musuh tanaman/perangsang tumbuh tanaman dan alat-alat pertanian.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengupayakan setiap petani untuk menanam varietas padi unggul dan menyediakan benih padi di setiap daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya melakukan pemilihan bibit secara selektif dengan bibit unggul seperti IR 42, padi sokan, padi inpara dan padi inpari yang didapatkan melalui bantuan diberikan oleh pemerintah dan hasil dari penangkaran dari kelompok tani setia karya. Terdapat kelompok tani memiliki penangkaran benih yang sudah teruji oleh Badan Penangkaran Bening Provinsi Riau.

Pengelolaan lahan ketika proses penanaman sebaiknya memberikan pupuk organik berupa pupuk kandang dan kompos jerami secara merata diatas lahan, namun yang terjadi pada lahan sawah di Kelurahan Kempas Jaya para petani menggunakan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk anorganik dianggap cara paling praktis dan cepat oleh

petani, sehingga penggunaan paling dominan dibanding pupuk organik.

Proses pengairan tanaman padi terjadi di Kelurahan Kempas Jaya yang sudah menggunakan saluran irigasi dengan sistem tanam menggunakan pengairan tadah hujan dan pompanisasi air pasang surut Bantuan saluran irigasi yang didapat Kelurahan Kempas Jaya sudah ada sejak tahun 1972 dan mulai normal pada tahun 1981, yang terus dirawat dengan cara setiap tahun dibersihkan sebanyak 2 kali.

pengendalian hama yang pengendalian hama pada tanaman padi di Kelurahan Kempas Jaya masih tergolong kurang, hal ini di dasarnya terjadi penyerangan hama wereng setiap tahunnya, namun petani selalu tidak mampu mengatasi dengan sendiri.

2. Kurangnya Penguatan Kelembagaan

Pengutan kelembagaan merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan kapasitas lembaga, maupun individu dalam memperbaiki sebuah kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan keorganisasian melalui penyempurnaan metode dalam organisasi.

Penguatan kelembagaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kepada kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada ketua kelompok tani, yang selanjutnya ketua menjelaskan dan memberikan contoh dari hasil pelatihan yang didapatkan.

3. Rendahnya Pengetahuan Petani

Pengetahuan merupakan salah satu komponen perilaku petani yang turut menjadi faktor dalam mengadopsi inovasi-inovasi baru, baik pengetahuan secara formal maupun non formal. Pendidikan formal adalah yang pernah ditamatkan oleh petani mendapatkan surat atau ijazah kelulusan sedangkan pendidikan non formal di dapat dari petani mengikuti pelatihan-pelatihan.

Pendidikan formal kelompok tani Kelurahan Kempas dengan paling banyak dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD).

¹⁶ Darmansyah dkk, *Op.cit.*, hlm. 51

Tabel 1 4 Jumlah Anggota dan Pendidikan Terakhir Kelompok Tani

No	Nama Kelompok Tani	Pendidikan Terakhir			
		SD	S M P	SM A/S TM	D-III
1	Setia Karya	27	5	7	1
2	Ingin Makmur	43	32	19	6
3	Pasundan	14	8	3	0
4	Makmur	9	18	6	2
Jumlah		93	63	35	9

Sumber : Koordinator Penyuluh Pertanian Kelurahan Kempas Jaya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggota kelompok tani Setia Karya, Ingin Makmur, Pasundan, dan Makmur memiliki jumlah total 200 dengan pendidikan terakhir lebih banyak pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 93 orang, namun hanya sedikit dengan pendidikan terakhir Diploma Tiga (D-III). Artinya masih rendahnya sumberdaya manusia petani di Kelurahan kempas jaya, di mana sebagian besar merupakan petani dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD).

b. Faktor External

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Kempas Jaya beriklim tropis basah dengan udara agak lembab dengan curah hujan yang tertinggi berkisar pada bulan November sampai bulan april, sedangkan untuk musim kemarau biasanya pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Musim pancaroba jatuh pada bulan april sampai dengan bulan juni. Sumber mata air utama yaitu memasok air dari dalam tanah dan sungai Indragiri. Keadaan tanah sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa, berwarna hitam, kelabu dan coklat dapat dijadikan tanah pertanian dengan klasifikasi sedang.

Cuaca merupakan hal yang sangat penting di perhitungkan oleh petani sebelum memulai proses tanam, hal ini karena faktor cuaca yang tidak menentu bahkan bisa mempengaruhi perkembangan dan hasil dari tanaman itu sendiri. Penggunaan pompa air merupakan bentuk adaptasi petani terhadap perubahan musim dalam bentuk teknologi

modern untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan ketersediaan air.

2. Tenaga Penyuluh

Tenaga penyuluh merupakan ujung tombak dari aparaturnya Negara yang sesungguhnya dalam program kedaulatan pangan. Hal ini dikarenakan penyuluh bertugas untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada petani agar pola pikir dan cara kerja para petani bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi pertanian.

Penyuluh pertanian setiap daerah memiliki beban kerja agar kelompok tani menjadi berdaya, namun sampai saat ini menjadi suatu masalah bagi pemerintah untuk terus memenuhi sesuai dengan amanat peraturan mengharuskan setiap desa yang ada di Indonesia memiliki 1 penyuluh yang pada kenyataannya terus mengalami kekurangan. Seperti halnya yang terjadi pada kecamatan kempas mengalami kekurangan penyuluh pertanian hanya ada 5 orang dengan 4 orang penyuluh perkebunan. Dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 1 4 Jumlah Penyuluh Pertanian Kecamatan Kempas

No	Nama Penyuluh	Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP)
1	Mundir	Desa Bayas Jaya dan Sungai Rabit
2	H. Ali Amra	Desa Pekantua dan Kerta Jaya
3	Suristo	Kelurahan Kempas Jaya
4	Eko Pirmanto	Desa Sungai Gantang dan Sungai Ara
5	Kamarul Zaman	Danau Pulau Indah

Sumber : Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kempas Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 8 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kempas memiliki penyuluh pertanian. Sedangkan 4 desanya lagi penyuluh pertanian sudah pensiun. Namun penyuluh yang pensiun bisa menjadi penyuluh swadaya artinya secara sukarela membantu para petani dalam memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menjalankan perannya sebagai penyuluh pertanian dengan cukup baik, yang dibuktikan petani-petani Kelurahan Kempas Jaya mendapatkan program pemberdayaan di lihat melalui empat bina berikut ini:

1. Bina Manusia dalam ini peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diwujudkan dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk petani di Kelurahan Kempas Jaya
2. Bina Usaha diwujudkan dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan memberdayakan petani dengan cara adanya Kredit Usaha Rakyat, Koperasi, Jaringan Pemasaran.
3. Bina Lingkungan diwujudkan dengan adanya lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan ikut sertanya penyuluh dalam proses gotong royong ketika akan musim tanam tiba.
4. Bina Kelembagaan diwujudkan dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan memberdayakan petani melalui komponen person, kepentingan, aturan dan struktur.

b. Dalam proses pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami beberapa penghambat yaitu dari faktor internal dan external. Faktor penghambat internal berupa kurangnya sarana produksi, kurangnya penguatan kelembagaan dan rendahnya pengetahuan petani. Sedangkan faktor penghambat dari external adalah kondisi geografis dan tenaga penyuluh.

2. Saran

Adapun saran dan harapan yang dapat peneliti sampaikan dalam skripsi ini sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu :

1. Kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat melakukan penilaian kelompok tani setiap tahunnya memperbaharui data laporan tahunan sehingga kelas kemampuan kelompok tani benar-benar sesuai dengan kenyataannya.
2. Kepada kelompok tani di Kelurahan Kempas Jaya diharapkan lebih ditingkatkan partisipasi dalam setiap kegiatan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Faqih. (2016) Model pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai. Yogyakarta : Deepublish
- Alfitri. (2012). Community development teori dan aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Prastawo. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Danu Eko Agustinova. (2015). Memahami metode penelitian kualitatif; teori & praktik, Yogyakarta: Calpulus,
- Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan. (2019). Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish.
- Hardani dkk. (2020) . Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif,. Yogyakarta : Cv. Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta.
- Haw Widjaja. (2004). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pusat Penyuluhan Pertanian. (2018). Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani. Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Lucie Setiana. (2005). Teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Oos M.Anwas. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di era global. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 67/permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 48/HK.310/12/201 tentang Petunjuk Tennis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir